

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat didefinisikan sebagai transportasi. Sistem transportasi pada suatu wilayah terdiri dari sarana, prasarana dan sistem pelayanan. Adanya pergerakan ke seluruh wilayah disebabkan oleh sistem transportasi sehingga terjadi mobilitas penduduk, pergerakan barang serta akses keseluruhan wilayah (Vaula Ressay, 2013). Transportasi terdiri dari tiga jenis antara lain: transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara (Ina, 2015). Dalam penelitian ini berfokus pada Transportasi Darat yang didalamnya terdapat transportasi untuk mengangkut penumpang atau barang yang berada di darat. Salah satu transportasi darat ialah angkutan umum. Angkutan umum merupakan suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perpindahan penumpang ataupun distribusi suatu barang, dalam penggunaan angkutan umum tersebut membutuhkan tarif baik menurut jarak ataupun sesuai dengan ketetapan tarif yang telah dibuat. Maka hal ini memerlukan penanganan yang serius oleh pemerintah agar para pengguna angkutan dan penyedia mendapatkan penanganan yang sesuai agar angkutan di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan baik.

Perkembangan transportasi di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami perubahan. Ketergantungan akan moda pun muncul sehingga memisahkan antara pengguna jasa *captive* dan pengguna jasa *choice*. Orang-orang yang hanya bergantung pada satu pilihan moda (biasanya angkutan umum) dapat digolongkan menjadi pengguna jasa *captive*, sedangkan pengguna jasa *choice* merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memilih antara menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum (Deddy, 2015). Karakteristik pengguna jasa yang bervariasi ini berpengaruh terhadap jenis pergerakan tiap-tiap individu masyarakat. Masyarakat dengan berbagai macam kegiatan dan kebutuhan

pastinya membutuhkan pelayanan angkutan umum sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan terbagi dua yakni Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek. Angkutan umum trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian angkutan umum tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur. Saat ini Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh beberapa angkutan umum meliputi Angkutan Umum Dalam Trayek dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Angkutan Umum Dalam Trayek Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Pedesaan. Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek di Kabupaten Gunungkidul yaitu Angkutan Travel, Angkutan Pariwisata, dan Angkutan Bus Sekolah serta angkutan pendukung (Paratransit) daerah di Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh ojek dan becak.

Berdasarkan PM 74 Tahun 2014 pasal 22 e tentang Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Saat ini Kabupaten Gunungkidul memiliki layanan angkutan pedesaan (angdes) yang diatur dalam SK Trayek tahun 2022 tentang penetapan jaringan trayek angkutan pedesaan Kabupaten Gunungkidul. Dimana dalam SK tersebut, Kabupaten Gunungkidul dilayani 41 trayek angkutan pedesaan. Namun untuk kondisi eksisting pada wilayah studi, angkutan pedesaan yang beroperasi sesuai rutenya hanya ada 3 trayek. Hal ini dikarenakan rendahnya permintaan akan pelayanan angkutan pedesaan dapat dilihat dari faktor muat rata ratanya, beberapa angkutan trayek lain hanya beroperasi sesuai permintaan penumpang, jika tidak ada permintaan maka tidak beroperasi.

Berdasarkan hasil analisis sementara ditemukan beberapa masalah pelayanan angkutan umum seperti banyaknya trayek yang sudah tidak beroperasi, pendapatan operator yang kecil, dan juga tingkat kenyamanan jasa angkutan umum yang rendah menjadikan kinerja angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul menjadi tidak optimal. Faktor muat rata rata sebesar 18% yang menunjukkan hanya 5 sampai 6 penumpang yang terangkut tiap perjalanan menunjukkan minat masyarakat yang kurang terhadap pelayanan angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Gunungkidul . Tingkat operasi rata rata sebesar 68% menyebabkan adanya indikasi over supply pelayanan yang diberikan terhadap permintaan jasa yang ada, serta usia kendaraan yang relatif tua yaitu umur rata-rata kendaraan adalah 25-35 tahun dimana semakin tua umur kendaraan maka tingkat kenyamanan pengguna jasa akan semakin menurun.

Berdasarkan permasalahan yang ada terdapat masalah angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pendapatan dan biaya operasional kendaraan yang harus dikeluarkan. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melatarbelakangi penulis untuk membuat Kertas Kerja Wajib ini berjudul **“EVALUASI FAKTOR KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN PEDESAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN OPERATOR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK terdapat 41 trayek tetapi kondisi eksisting hanya 3 trayek yang beroperasi melayani daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah armada yang beroperasi terhadap pendapatan dan biaya operasional kendaraan
3. Pendapatan dan biaya operasional kendaraan tidak sesuai sehingga operator mengalami kerugian dari sisi biaya operasi kendaraan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dapat dirumuskan masalah angkutan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan?
2. Berapa jumlah armada yang dibutuhkan agar keseimbangan antara jumlah armada yang beroperasi terhadap pendapatan dan biaya operasional harian berkeseimbangan?
3. Apa saja upaya peningkatan pelayanan angkutan pedesaan yang harus dilakukan agar terjadi kesesuaian antara biaya operasional kendaraan dan pendapatan operator?

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul dan bagaimana cara meningkatkan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul yang nantinya dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atau operator.

Sedangkan tujuan Penulisan Kertas Kerja Wajib ini sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi faktor kinerja pelayanan angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
2. Menghitung kebutuhan armada yang optimal dan sesuai dengan faktor muat saat ini.
3. Melakukan perhitungan pendapatan operator terhadap biaya operasional yang dikeluarkan, kemudian melakukan analisis laba rugi operator.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar lebih fokus pada judul yang dikaji dalam Kertas Kerja Wajib ini:

1. Penelitian dilakukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai evaluasi kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul
3. Menghitung jumlah armada yang diperlukan terhadap faktor muat saat ini.
4. Tidak melakukan analisis penjadwalan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kertas kerja wajib ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan mengenai daerah studi, diantaranya mencakup kondisi sekarang seperti kondisi geografis, wilayah administratif, kondisi demografi, kondisi transportasi, dan kondisi wilayah kajian.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai pengertian-pengertian, teori-teori yang digunakan dalam menganalisa baik secara teknis maupun legalitasnya.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai alur pikir penelitian, bagan alir, metode penelitian dan analisis, dimana pada bab tersebut terdiri dari 2 metode, pada metode penelitian membahas pengumpulan data sekunder dan primer.

BAB V ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis data yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, hingga didapat hasil akhir perencanaan penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab keenam yang merupakan penutup ini akan menyimpulkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran pemecahannya yang sebaiknya dilakukan.